

Jalan Sudirman Bogor Diberlakukan Buka Tutup Situasional

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) menyepakati aturan buka tutup di Jalan Jenderal Sudirman dari pukul 19.00 WIB sampai 05.00 WIB setelah selama satu pekan ditutup demi mencegah penyebaran Covid-19 karena kerumunan.

Kesepakatan ini berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) di mana dalam seminggu terakhir tidak terjadi kerumunan di kawasan itu.

"Hasil evaluasi selama dilakukan kebijakan itu, situasi di Jenderal Sudirman kondusif alias tidak ada kerumunan," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo, Kamis (21/1).

Eko mengatakan, kebijakan ini sesuai arahan Wali Kota Bogor, Kapolres Bogor Kota, Dandim 0606 Suryakanca. Kebijakan penutupan total di malam hari diganti dengan penutupan situasional. "Jika muncul kerumunan, petugas akan mobile dan turun

untuk menutup ruas jalan. Di dalamnya akan turun tim pemburu pelanggaran protokol kesehatan (prokes) menyalir kerumunan," tegasnya.

Ia menerangkan, ketika situasi kondisi jalan Sudirman Bogor kondusif dan tidak ada kerumunan, ruas jalan kembali dibuka. Kebijakan ini tidak hanya berlaku di Jalan Sudirman, melainkan jalan lainnya. Jika terdapat kerumunan, akan dilakukan penutupan.

"Semua kegiatan buka tutup di bawah kendali jajaran raya, dalam hal ini satlantas, dan dishub bagian tim crowd free road siap didukung dengan kekuatan personel dan sarana yang ada," imbuhnya.

Eko Prabowo menambahkan, masyarakat bisa turut aktif dan melaporkan kepada dishub dan Satpol PP jika melihat situasi wilayah menjadi tempat kerumunan dan rawan penyebaran Covid-19. "Kebijakan ini sampai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau sampai 25 Januari 2021," pungkasnya. ● **gio**

Tangani Covid-19, 619 Polisi Disebar ke Seluruh RW di Bogor

BOGOR (IM)- Sebanyak 619 aparat kepolisian disebar ke 795 RW se-Kota Bogor. Mereka akan melakukan pembinaan sekaligus pengawasan untuk menekan angka penularan Covid-19 yang terus meningkat.

"Kami dari kepolisian akan mencurahkan pekerjaan kami untuk melawan berujung menekan tingginya angka Covid-19. Sinergritas diantara kami tentunya sampai di level RW sebagai basis terdepan bersama RT untuk klaster-klaster keluarga dipemukiman itu bisa ditekan," kata Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo, Kamis (21/1).

Susatyo menambahkan, tugas utama personilnya itu melakukan pembinaan bersama aparat wilayah setempat untuk memberikan pemahaman terkait covid-19. Juga mengawasi jika ada pelanggaran dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Bogor. "Ini tugas premitif dan preventif. Kami berusaha mengkolaborasi. Ada 5M yang kami lakukan. Satu mendengar, kedua melihat, ketiga membina, keempat membantu kelima mengkoordinasikan," tuturnya.

Untuk penegakan hukum-

nya, tambah Susatyo, pihaknya mempunyai tim Pemburu Pelanggar PPKM yang terdiri dari aparat gabungan TNI-Polri dan Satpol PP. Tim itu diturunkan jika mendapat laporan dari polisi RW ditemukan pelanggaran maupun lainnya.

"Kalau penegakan hukum kami ada tim Pemburu Pelanggar PPKM. Jadi kami membina kalau gak bisa oke kita akan memanggil tim pemburu pelanggaran. Jadi kami mendorong pak RT dan pak RW lebih aktif lagi untuk bisa membuat langkah-langkah konkret. Kalau gak bisa diingatkan dan sebagainya nanti ada tim gabungan nanti ada penindakan," tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugarto mengaku adanya polisi RW ini sangat diharapkan membantu menangani masalah covid-19. Karena, permasalahan covid-19 harus ditangani bersama.

"Covid-19 ini dimensi banyak, bukan hanya kesehatan tapi keamanan, ketertiban. Dikesampingkan ini tupoksi siapa, overlap siapa, yang penting kita turun. Kita turun sama-sama karena masalahnya itu banyak. Makanya saya juga istilah pak Kapolresta, belanja masalah di bawah," ucap Bima. ● **gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PROYEK PENGENDALI BANJIR DI KABUPATEN BANDUNG

Pekerja mengoperasikan alat berat pada proyek pembangunan kolam retensi di Andir, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/1). Kolam Retensi Andir dengan luas kurang lebih lima hektar yang berfungsi untuk pengendali banjir luapan Sungai Citarum tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2021 mendatang.

Wagub Jabar Minta Pusat Kaji Peralihan Izin Pertambangan

Peralihan kewenangan izin pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, akan memperpanjang proses perizinan dan akan membuat pengusaha sulit mendapatkan legalitas. Hal itu bias membuat banyak galian yang tidak berizin, kata Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum.

BANDUNG (IM)- Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum meminta pemerintah pusat mengkaji kembali kebijakan peralihan kewenangan izin pertamban-

gan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Menurut Kang Uu, peralihan izin tersebut akan menyulitkan pengusaha untuk membuat izin. Selain itu, masyarakat ter-

dampak pertambangan pun akan sulit melakukan pelaporan.

"Menyikapi masalah kewenangan tentang yang sekarang diambil lagi oleh Pusat. Menurut kami ini akan semakin menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan legalitas (usaha pertambangan)," kata Kang Uu.

Kang Uu mengatakan, peralihan izin tersebut akan memperpanjang proses perizinan dan akan membuat pengusaha sulit mendapatkan legalitas. "Waktu perizinan masih di pemerintah daerah, banyak masyarakat yang merasa berat membuat legalitas untuk kegiatan pertambangan. Itu membuat banyak galian yang tidak berizin," ujarnya.

"Saat saya ditugaskan oleh Gubernur Jabar melakukan monev (monitoring dan evaluasi) ke kota/kabupaten, sebagian besar tidak memiliki izin resmi, sehingga tidak ada retribusi," katanya.

Selain itu, menurut Kang Uu, saat pengusaha pertambangan tidak memiliki izin, kegiatan pertambangan mereka akan sporadis dan tidak teratur. Pemerintah pun akan kesulitan memantau dan mengawasi. Hal itu tentu akan berdampak pada kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar pertambangan.

"Sebetulnya para pengusaha ingin punya legalitas dan ketenangan dalam usahanya. Tapi karena dianggap sulit un-

tuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah, maka mereka tidak memiliki izin," katanya.

"Harapan kami, ada kuota, batas (luas) tertentu untuk sekian hektare izin bisa di kabupaten/kota, sekian hektare di pemerintah provinsi, untuk sekian hektare baru izin dari pusat," tambah Uu.

Kang Uu pun berharap pemerintah pusat kembali mengkaji kebijakan tersebut secara komprehensif, sehingga kewenangan yang diputuskan menjawab masalah sesungguhnya di lapangan.

"Harapan kami pemerintah pusat memberikan mekanisme yang jelas tentang manajemen izin," ujarnya. ● **pur**

Perda Ekraf Kawal Ekosistem Ekonomi Kreatif Bandung

BANDUNG (IM)- Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniarsari mengatakan, Kota Bandung telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Ekraf).

Menurutnya, dengan adanya perda tentang ekonomi kreatif tersebut dapat menjadi pedoman dalam menata dan mengembangkan ekonomi kreatif. Selain itu, hal tersebut dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan sektor ekonomi dalam situasi pandemi saat ini.

"Ada delapan ruang lingkup yang diatur. Pertama pelaku ekonomi kreatif, penataan ekonomi kreatif, pengembangan ekonomi kreatif, pusat kreasi dan kota kreatif, komite penataan dan pengembangan ekraf, pendanaan, sistem informasi ekraf serta pengawasan dan pengendalian,"

kata Kenny Kamis (21/1).

Ditambahkan dia, perda tersebut juga lahir untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif di Kota Bandung. Karena selama ini, industri kreatif terkesan berjalan sendiri tanpa adanya aturan khusus yang mengaturnya.

"Nantinya akan ada keber-

lanjutan program tentang ekonomi kreatif, terciptanya ekosistem ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan tentu akan terciptanya lapangan kerja baru sehingga menimbulkan dampak positif ekonomi terhadap usaha lokal," ucapnya. ● **pur**



IDN/ANTARA

BANJIR AKIBAT DRAINASE BURUK

Warga menerobos genangan banjir di perumahan desa Sindang, Kecamatan Sindang, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (21/1). Buruknya drainase membuat sejumlah rumah warga di daerah itu kerap tergenang air ketika hujan turun.

Disperindag Kota Tangerang Gandeng Bulog Gelar OP Daging Sapi

TANGERANG (IM)- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang, Banten, berkoordinasi dengan Bulog untuk segera melakukan operasi pasar daging sapi sebagai upaya menyelesaikan persoalan kenaikan harga komoditas tersebut.

"Kami berkoordinasi dengan Bulog untuk melakukan operasi pasar terkait kenaikan harga daging sapi ini karena memang kewenangan ada di mereka," kata Kepala Dinas Indag UKM Kota Tangerang, Teddy Bayu dalam keterangan resminya, Kamis (21/1).

Untuk mengantisipasi kelangkaan daging sapi di pasaran akibat aksi mogok dari pedagang, Pemkot juga meminta Kementerian Perdagangan untuk menambah stok daging sapi di Kota Tangerang.

"Kami telah mengirimkan surat ke kementerian untuk meminta penambahan stok daging sapi, untuk mengantisipasi kelangkaan daging akibat aksi mogok yang dilakukan para pedagang," katanya.

Selain itu, lanjut Teddy, pihak pemkot melalui PD Pasar juga akan mencari suplai sapi lokal di wilayah Banten.

"Kita melalui PD Pasar akan mencari alternatif sapi lokal di wilayah Banten," ucapnya. Teddy mengungkapkan aksi mogok pedagang lebih disebabkan oleh kenaikan harga daging sapi impor dari Australia. "Untuk wilayah Jadetabek itu kan mengandalkan impor sapi dari Australia, dan daging sapi impor dari Australia naik secara mendadak sedang distributor serta pedagang tidak bisa jual karena ketinggian harganya. Tapi Jumat mereka mulai jualan lagi," katanya.

Terkait operasi pasar, Teddy menambahkan bahwa pelaksanaannya akan menasar para pedagang langsung, dan dilaksanakan secara daring mengingat kondisi pandemi. "Nanti akan kami tawarkan secara langsung ke pedagang yang berminat secara online, karena jumlah dagingnya juga terbatas," ujarnya. ● **pp**

Buka Sampai Malam, Tiga Kafe di Serpong Utara Disegel

TANGSEL (IM)- Tiga kafe di Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan disegel Satpol PP Kota Tangsel. Sanksi berupa penyegelan tersebut karena ketiga kafe itu terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Di Serpong Utara semua (tiga kafe yang disegel)," ujar Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kota Tangsel, Muksin Al Fachri saat dikonfirmasi, Kamis (21/1). Namun, dia tidak menyebutkan identitas ketiga kafe tersebut.

Penyegelan dilakukan saat gelaran patroli oleh Satpol PP, bersama dengan TNI, Polri, serta tim keamanan dan ketertiban dari kecamatan dan kelurahan, Rabu (20/1) malam menjelang Kamis di sekitar wilayah Serpong Utara. Ketiga kafe tersebut, kata Muksin, sebenarnya sudah dilakukan peringatan, tetapi tetap membandel dengan beroperasi me-

lebih batas yang ditentukan, yakni pukul 20.00 WIB.

"Tempat-tempat ramai yang lewat dari jam 20.00 WIB malam dan penuh, itu sudah diperingatkan oleh kelurahan dan kecamatan, tapi masih ngerti sudah sekitar dua atau tiga hari diperingatkan, makanya disegel. Jadi kalau bandel, kita segel," terangnya.

Muksin menuturkan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti penyegelan tersebut. Ia menjelaskan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, mulai dari mengenakan denda hingga penutupan usaha.

"Kalau saya ngusulin, pertama bayar denda. Kedua, boleh misalnya membuka tetapi dengan membikin pernyataan untuk mematuhi prokes, apabila tidak mematuhi prokes karena sudah pernah didenda dan disegel maka akan kita tutup. Bisa saja tutup permanen kalau si pelanggar tidak punya TDUP (tanda daftar usaha

pariwisata)," kata dia.

Selain membandelnya sejumlah tempat usaha, Muksin juga menuturkan saat melakukan patroli masih tampak adanya kerumunan masyarakat yang notabene adalah kalangan anak muda. Terhadap adanya kerumunan tersebut, pihaknya hanya melakukan pembubaran. Jumlah kerumunan yang didapati diketahui mencapai 20-an titik.

"Banyak juga sih ada di lebih dari 20 titik kayaknya yang kerumunan. Anak-anak muda, itu di taman-taman begitu," jelasnya.

Muksin menambahkan, terkait dengan upaya meningkatkan kedisiplinan masyarakat, pihaknya menekankan peran dari pihak kecamatan dan kelurahan untuk lebih masif dalam melakukan pengawasan. "Jadi memang perlu pihak kelurahan kecamatan terutama juga bergerak memperingatkan. Kecamatan dan kelurahan kan juga punya kewenangan segel," kata dia. ● **pp**



IDN/ANTARA

JALAN RUSAK DI BOGOR

Pengendara melintasi jalan yang rusak dan tergenang air di jalan penghubung antara Kabupaten Bogor dan Kota Depok, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/1). Jalan rusak dan tergenang air akibat tidak adanya drainase serta intensitas hujan yang tinggi tersebut dapat membahayakan keselamatan pengendara, dan selama ini belum ada perhatian dari Pemerintah setempat.

TARIF NAIK JADI RP14.000

Tol BORR Seksi IIIA Beroperasi Akhir Januari

BOGOR (IM) - Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi III A Simpang Yasmin - Kayu Manis dibuka akhir Januari 2021. Rencananya ada penyelesaian tarif dari Rp 10.000 menjadi Rp 14.000.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menuturkan, pengoperasian jalan tol tersebut sempat tertunda akibat kendala yang dihadapi PT Marga Sarana Jabar (MSJ) dalam proses pembangunan. "Namun karena ada investasi yang besar dalam proses pembangunan Tol BORR Sesi 3 A, maka kenaikan tarif menjadi konsekuensi," kata Dedie, Kamis (21/1).

Saat ini tarif Tol BORR Seksi 3 A mulai ruas Sentul Selatan - Simpang Yasmin sebesar Rp 10.000. Dengan penambahan jarak sejauh 2,5 km hingga Salabenda, naik Rp 4.000. Tarif tersebut telah disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPTJ). "Kenaikan tarif tol bisa dipahami mengingat nilai investasi cukup tinggi yang berdampak langsung pada pembebanan kepada peng-

guna jalan tol," katanya.

Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar, Dedi Krisnariawan Sunoto menjelaskan kendala selama pembangunan adalah pembebasan lahan atau tanah. Selain itu, biaya konstruksi cukup besar mengingat BORR adalah jalan layang dengan tiga lajur. "Saya kasih contoh, harga pembangunan jalan tol per kilomernya hampir Rp 600 miliar. Jadi untuk 2,85 km menghabiskan Rp 1,66 triliun," sebutnya.

Penetapan tarif Rp 14.000 merupakan hasil kajian beberapa aspek, di antaranya pertimbangan kemampuan dan kemauan membayar pengguna jalan tol serta pertimbangan pengembalian dana pinjaman PT MSJ.

Dengan tarif tersebut, perusahaan mengaku akan mengalami defisit terlebih dahulu untuk beberapa tahun ke depan, sambil berharap pertumbuhan lalu lintas meningkat pertumbuhan pembangunan jalan tol baru. "Jalan tol adalah jalan alternatif bukan jalan utama atau bukan sebaliknya. Alternatif agar lebih cepat dan lebih lancar," jelasnya. ● **gio**

Kota Medan Kembali Masuk Zona Merah Covid-19

MEDAN (IM)-Satuan tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 melansir Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) kembali masuk ke dalam zona merah Covid-19. Lima daerah masuk zona kuning (penyebaran rendah) dan 3 kabupaten masih bertahan di zona hijau (tidak ada kasus) Covid-19. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Aris Yudhaningsih mengatakan, akumulasi kasus terkonfirmasi di Medan sebanyak 9.752 orang, sebanyak 8.489 orang di antaranya sembuh dan 345 orang lainnya meninggal dunia. "Untuk kasus terkonfirmasi di Sumut hingga, Rabu (20/1), sebanyak 19.879 orang. Sebanyak 17.150 orang di antaranya dinyatakan sudah sembuh dan 718 orang meninggal dunia," ujar Aris di Medan, Kamis (21/1).

Aris menyampaikan, kasus aktif terkonfirmasi di Medan sebanyak 918 orang, yang saat ini sedang menjalani isolasi. Untuk zona kuning terdapat di Kabupaten

Tapanuli Utara, Simalungun, Asahan, Padang Sidempuan dan Nias Utara. Kemudian untuk zona hijau ada 3 yaitu Nias, Nias Selatan, Nias Barat. "Simalungun menyisakan 44 orang pasien, Asahan 60 pasien, Padang Sidempuan 5 pasien dan Nias Utara 0 pasien. Sedangkan zona hijau di Nias menyisakan 1 pasien, Nias Selatan menyisakan 4 pasien dan Nias Barat menyisakan 1 pasien," katanya.

Menurutnya, terjadi penambahan kasus terkonfirmasi sebanyak 80 orang pada 15 kabupaten/kota. Angka kesembuhan le ih tinggi dari penambahan terkonfirmasi, pada Rabu (20/1/2021), sebanyak 90 orang dari 9 kabupaten/kota di Sumut. "Penambahan kasus terbanyak dari Mesan sebanyak 47 orang dan Deli Serdang 10 orang. Sementara untuk angka kesembuhan jumlah terbanyak didapatkan dari Medan dengan 38 orang dan Pematang Siantar 37 orang," ucapnya. ● **yan**